ECODUCATION
Economics & Education Journal
Volume 7, Nomor 2, Agustus 2025
P-ISSN : 2684-6993 (Print), E-ISSN : 2656-5234 (Online)

Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dewi Febriyani[1]*, Sultan[2], Riyanti[3]
[1,2,3,] Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palopo
E-mail Correspondence: febriyanid319@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to examine the impact of accrual-based accounting, good governance, internal control systems on the effectiveness of local financial management. The research method used in this study is quantitative, which is collected using a questionnaire distribution method, and distributed to 57 employees involved in local financial management. Multiple linear regression is used to analyze the data to assess the contribution of each variable to the effectiveness of local financial management. The results of this study indicate that the accounting system and internal control that are charged have a significant impact on the effectiveness of local financial management. These results indicate the importance of understanding the implementation of accrual-based accounting and the importance of internal control systems for local financial management to remain effective.

Keywords: *Accrual-Based Accounting, Good governance, Internal Control System, Regional Financial Management*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak akuntansi berbasis akrual, *good governance*, Sistem Pengendalian Internal (SPI) pada efektivitas manajemen keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yang dikumpulkan menggunakan metode distribusi kuesioner, dan didistribusikan kepada 57 karyawan yang terlibat dalam manajemen keuangan daerah. Regresi liner berganda digunakan untuk menganalisis data untuk menilai kontribusi masing -masing variabel terhadap efektivitas manajemen keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi dan pengendali internal yang ditagih memiliki dampak signifikan pada efektivitas manajemen keuangan daerah. Hasil ini menunjukkan pentingnya memahami penerapan akuntansi berbasis akrual dan SPI untuk manajemen keuangan daerah tetap efektif.

Kata kunci: Akuntansi Basis Akrual, *Good Governance*, SPI, Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Manajemen keuangan daerah merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah (Rosyidah et al., 2023). Sehubungan dengan otonomi lokal, pemerintah daerah harus lebih transparan, akuntabel, dan efisien untuk mengelola keuangan mereka. Kambuaya (Kambuaya et al., 2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi berbasis akrual dapat memberikan informasi keuangan yang lebih komprehensif, untuk mendukung keputusan yang lebih baik oleh para pemangku kepentingan. Menurut Yatminiwati (2019) ketika menerapkan *good governance*, pemerintahan yang baik itu mengharuskan manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan adil. Dengan menggunakan pemerintahan yang baik, pemerintah mengimplementasikan otonomi daerah, otonomi daerah ini pada akhirnya membutuhkan peraturan yang terkait dengan manajemen keuangan regional dan negara (Tariza et al., 2023). Dalam hal ini, penerapan akuntansi berbasis akrual, *good governance*, dan penggunaan SPI adalah peran yang sangat strategis dan sangat kolaboratif (Agustina, D., & Dwitayanti, 2024). Secara umum, ada dua dasar untuk mengimplementasikan aplikasi dalam akuntansi yaitu basis kas dan basis akrual (Rosana & Bharata, 2023).

Menurut Wawointana et al (2021) dalam pembukuan berbasis akrual adalah platform akuntansi yang dicatat dan disajikan selama transaksi ekonomi atau peristiwa lain, selama transaksi yang setara dengan kas diterima atau dibayarkan. Dalam makalah yang sama, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) menyatakan bahwa waktu perekaman pembukuan yang diakui harus mengikuti waktu aliran sumber daya. Seluruh aliran sumber daya dicatat, memungkinkan untuk informasi yang sangat luas. Riwukore et al (2022) berpendapat bahwa konsep pengelolaan aspek ekonomi yang mempengaruhi proses keputusan yang memengaruhi kegiatan langsung atau tidak langsung negara tersebut terkait dengan keadilan, kemiskinan, dan ekonomi lain yang mempengaruhi kualitas hidup.

Menurut Sintia et al (2022) bahwa SPI pemerintah adalah proses lengkap dengan langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh kepemimpinan dan semua karyawan untuk memastikan kepercayaan yang tepat dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

pelaporan keuangan, keamanan dan keandalan retensi padaperundang-undangan.Oleh karena itu penting untuk melakukan penelitian yang lebih dalam tentang dampak akuntansi berbasis akrual, *good governance,* dan penerapan sistem pengendali internal.

Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Wawointana et al., 2021). Akuntansi berbasis akrual juga mencatat transaksi keuangan pada saat terjadi, bukan pada saat uang diterima atau dibayar (Nafisah & Witono, 2024). Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan komprehensif, yang menggambarkan kewajiban dan hak yang timbul dari transaksi keuangan (Puji Afriyeni et al., 2024). Dengan demikian, sistem ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Negara (2020) menyatakan bahwa dari segi transparansi dan akuntabilitas, akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih transparan dan lebih akuntabel apabila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas.

Dalam tuntutan akuntabilitas lembaga negara dalam konsep *great administration* ini merupakan tanggung jawab performa lembaga negara atas fungsi, kewenangan, dan otoritas tertentu yang dilaksanakan (Ramadhani et al., 2024). Dalam prinsip *good governance* atau tata kelola yang baik berperan penting dalam menciptakan iklim pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan responsivitas menjadi dasar dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan anggaran. Pada Prinsip *great administration* quip mulai menggeliat ketika pada saat time reformasi terjadi di Indonesia seiring dengan pergantian kekuasaan dengan reformasi birokrasi, semangat demokrasi, pemberantasan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta penerapan desentralisasi (Sipayung & Wahyudi, 2022). *Great administration* juga memastikan bahwa keputusan-keputusan dalam pengelolaan keuangan daerah diambil dengan dasar yang jelas, melibatkan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengelolaan keuangan juga tidak terlepas dari peran audit internal. SPI merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan (Ramadhani et al., 2024). SPI pemerintah juga merupakan suatu proses atas tindakan dan kegiatan yang akan dilakukan secara berkesinambungan (Sintia et al., 2022). Maka dirancanglah SPI untuk memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat mengidentifikasi serta mencegah adanya penyimpangan, kesalahan, atau penyalahgunaan anggaran, dengan SPI yang kuat pemerintah daerah dapat lebih ideal dalam mengelola keuangannya dan mengurangi resiko kerugian akibat tindakan yang tidak sesuai (Ukkas et al., 2022).

Elemen akuntansi berbasis akrual, *good governance*, dan SPI sudah diterapkan dalam berbagai daerah di Indonesia, tantangan besar masih tetap ada. Beberapa daerah masih menghadapi masalah terkait ketidaksesuaian laporan keuangan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan anggaran, serta adanya kelemahan dalam pengendalian keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali sejauh mana ketiga faktor tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan untuk mengidentifikasi tantangan serta peluang yang dapat dioptimalkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik. Dengan memahami pengaruh penerapan ketiga elemen ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem keuangan mereka, meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan efektif.

Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual, *good governance,* dan sistem pengendalian internal yang di terapkan di daerah Luwu Timur merupakan bentuk komitmen, karena telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 13 kali secara keseluruhan bagi Kabupaten Luwu Timur, sebagai konsisten dan komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah secara transparansi dan akuntabel. Namun opini WTP itu bukan berarti tanpa celah, melainkan karena masih ada beberapa catatan hasil audit laporan keuangan oleh BPK yang perlu mendapat

perhatian dan perbaikan. Dan hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola keuangan daerah.

1. Akuntansi Berbasis Akrual

   Negara (2020) menyatakan bahwa dilihat dari segi transparanasi dan akuntabilitas, akuntansi bebsis akrual bisa menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel jika dibandingkan dengan akuntansi yang bebasis kas. Hal ini terjadi karena dalam akuntansi bebasis akrual mencatat seluruh beban yang terjadi baik yang telah dibayarkan dan diakui. Dengan demikian akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan perhitungan biaya pelayanan publik yang lebih wajar. Dalam Pernyataan Satandar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 01 bahwa acrual based dalam akuntansi merupakan metode dengan mengakui suatu transaksi dan pristiwa ketika terjadi tanpa mempertimbangkan waktu kas di terima atau di bayarkan. Menurut Susanti & Andayani, (2025) Akuntansi berbasis akrual dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih andal karena dalam pencatatannya semua transaksi dan peristiwa ekonomi tercatat, termasuk transaksi yang belum terjadi.

2. *Good governance*

   Dalam negara yang demokratis *good governance* di implementasikan atas 5 (lima) dasar prinsip yang universal, yaitu *accountability*, *respontibility*, *fairness*, *transparency*, dan *independency*. *Accountability* merujuk pada pertanggungjawaban yang efektif dari lembaga dalam manajemen pemrintahan terhadap kejelasan prosedur kerja, fungsi dan struktur. Kemudian *respontibility* lebih merujuk pada kesesuaian manjemen pemeritahan sehat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* berorientasi pada kesetaraan dalam perlindungna dan pemenuhan hak-hak dasar yang berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku. *Transparency* lebih berfokus pada keterbukaan informasi manajemen pemerintahan yang baik secara material dan relevan dalam proses penganbilan keputusan. Sedangkan *independency* berorientasi pada profesionalitas terhadap manajemen

pemerintahan yang tidak ditekan, tidak diatur, atau tidak bertabrakan terhadap kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. (Riwukore et al., 2022). *Good governance* adalah konsep yang berkaitan dengan cara-cara pemerintah mengelola urusan publik secara efisien, transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif. Karena tujuan utama dari *good governance* adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyaraka (Maimanah & Nurdiono, 2024).

3. Sistem Pengandalian Internal

   SPI adalah kebijakan dan prosedur yang telah dirancang untuk memberi jaminan yang memadai bahwa tujuan organisasi, termasuk efektivitas dan efisiensi operasional, keandalan pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, dapat tercapai. Alhababy (2020) menyatakan bahwa SPI adalah proses integral dari pengukuran dan kegiatan yang dilakukan terus menerus oleh kepemimpinan dan semua karyawan untuk memastikan bahwa mereka dapat dipercaya dengan baik dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, keandalan aset nasional, dan kepatuhan terhadap peraturan hukum (Peraturan Negara No. 60, 2008). Menurut Santika et al (2021) sistem pengendalian yang efektif secara siknifikan dapat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

4. Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Efektivitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggunakan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai tujuan dalam pembangunan daerah. Menurut Frinaldi & Putri (2024) dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif ditandai dengan tercapainya kinerja anggaran yang sesuai dengan rencana dan indikator yang telah di tetapkan. Menurut Maulana M (2021) efektivitas pengelolaan ini di dasari pada beberapa faktor diantaranya kualitas sistem akuntansi, kepatuhan terhadap *good governance*, serta keberadaan sistem pengendalian yang memadai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Pendekatan ini dipilih untuk mengukur hubungan antara variabel independen (akuntansi berbasis akrual, *good governance*, dan SPI) dengan variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan daerah) secara objektif.

1. Populasi dan Sampel

   Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur, dengan responden berupa pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kepala bagian keuangan, bendahara, dan auditor internal. Yang keseluruhan berjumlah 57 pegawai. Dengan menjadikan populasi sebagai sampel, dengan kriteria bahwa responden memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Teknik Pengumpulan Data

   Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan skala *Likert* 1–5, dimana angka 1 dapat menunjukkan ke tidak setujuan, dan angka 5 menunjukkan kesetujuan terhadap pernyataan yaang diberikan kepada reponden. Dimana data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda. Teknik ini dipilih untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (akuntansi berbasis akrual, *good governance*, dan SPI) terhadap variabel dependen (efektivitas pengelolaan keuangan daerah). Pengujian statistik dilakukan dengan menggunakan SPSS.

3. Metode Analisis Data

   Analisis data adalah metode yang digunakan dalam pengelolaan data yang akan menjadi informasi. Analisis data diperlukan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada di penelitian dan untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Analisis data yang digunakan adalah:

   a. Uji Statistik Deskriptif

      Uji kualitas data merupakan uji yang di sarankan untuk digunakan oleh peneliti agar instrumen data kuesioner yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Uji Validitas

Uji validitas adalah ukuran level sebenarnya atau validitas valid dari suatu instrumen. Semakin tinggi validitas, atau perangkat yang lebih efektif, tetapi semakin rendah efektivitas perangkat sebagai gantinya. Tes validitas dapat secara efektif disebutkan dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel}. Jika nilai dalam perhitungan r_{hitung} lebih besar dari nilai r_{tabel}, maka indikator harus valid. Tes ini juga dapat dinyatakan valid ketika level signifikan di bawah 0,05.

c. Uji Reliabilitas

Tes reliabilitas digunakan untuk menentukan tingkat indikator yang konsisten yang digunakan untuk mendukung indikator. Uji reliabilitas dapat dinyatakan reliabel ketika nilai pada *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

d. Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas)

Uji normalitas adalah tes yang digunakan untuk menguji apakah variabel yang tersisa memiliki distribusi normal dalam model regresi. Data yang paling umum digunakan biasanya adalah data yang didistribusikan. Untuk menentukan Normalitas adalah dengan menjalankan tes dengan teknik sampling jenuh. Jika probabilitas melebihi 0,05, tes normal dapat didistribusikan seperti normal, dengan nilai probabilitas di bawah 0,05, tetapi data tidak didistribusikan dengan benar.

4. Uji Hipotesis

Analisis regresi berganda ialah adanya keterkaitan secara linear antara dua variabel independen maupun lebih dalam mempengaruhi variabel dependen. Berikut adalah rumus persamaan regresi berganda:

$$\mathbf{Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon}$$

Keterangan:
Y : Efektifitas Pengelolaan Keuanagan Daerah
a : Konstanta
β_1-β_4 : Koefisien Regresi atau Koefisien Arah
X_1 : Akuntansi Berbasis Akrual
X_2 : *Good governance*
X_3 : SPI
ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Berdasarkan Tabel 1, populasi dalam penelitian adalah seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Responden penelitian merupakan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti kepala bendahara, dan auditor internal, dengan kriteria bahwa responden memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan menyebarkan kuesioner kepada 57 karyawan, dan hasil statistik deskriptif dari empat variabel penelitian menunjukkan bahwa jumlah data yang kembali adalah sebanyak 30 observasi (N = 30) untuk masing-masing variabel. Variabel Akuntabilitas berbasis Akrual (Akn_basis_akrual) memiliki nilai minimum sebesar 18 dan maksimum sebesar 24, dengan rata-rata (*mean*) sebesar 19,80 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 1,808. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat akuntabilitas berbasis akrual pada sampel penelitian tergolong cukup baik, dengan variasi antar responden yang relatif rendah. Pada variabel *good governance*, nilai minimum adalah 18 dan maksimum adalah 25, dengan rata-rata 20,83 serta simpangan baku sebesar 1,967. Rata-rata nilai ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pada responden berada pada tingkat yang cukup tinggi. Untuk variabel Sistem Pengendalian Intern (SPI), diperoleh nilai minimum 17 dan maksimum 25, dengan nilai rata-rata sebesar 20,93 dan simpangan baku 1,799. Rata-rata ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem pengendalian intern di lingkungan pengelolaan keuangan daerah cukup efektif dan relatif konsisten antar responden. Terakhir, variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki nilai minimum 17 dan maksimum 25, dengan rata-rata 20,77 dan simpangan baku 1,654. Rata-rata yang tinggi dengan simpangan baku yang rendah menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dinilai cukup baik dan stabil di antara responden.

Tabel 1. *Descriptive Statistics*

	N	***Minimum***	***Maximum***	***Mean***	***Std. Deviation***
Akn_basis_akrual	30	18	24	19.80	1.808
Good_Governance	30	18	25	20.83	1.967
SPI	30	17	25	20.93	1.799
Efektivitas_Pengelolaan_Keuangan_Daerah	30	17	25	20.77	1.654
Valid N (*listwise*)	30				

Sumber: data olahan, 2025

2. Hasil Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur variabel yang diteliti secara akurat. Teknik analisis yang digunakan adalah korelasi *Pearson Product Moment* dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji validitas, seluruh item pertanyaan pada variabel Akuntansi Berbasis Akrual (X_1) menunjukkan nilai *Pearson Correlation* berkisar antara 0,518 hingga 0,734 dengan signifikansi antara 0,000 hingga 0,003. Demikian pula, variabel *good governance* (X_2) memiliki nilai korelasi antara 0,508 hingga 0,848 dengan signifikansi 0,000 hingga 0,004. Untuk variabel Sistem Pengendalian Internal (X_3), nilai korelasi berkisar antara 0,555 hingga 0,851 dengan signifikansi 0,000 hingga 0,001. Sementara itu, variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) menunjukkan nilai korelasi antara 0,520 hingga 0,753 dengan signifikansi 0,000 hingga 0,003. Karena seluruh item memiliki nilai korelasi lebih dari 0,5 dan tingkat signifikansi di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya.

Tabel 2. Uji Validitas

Variable	**Item**	$\mathbf{r_{hitung}}$	$\mathbf{r_{tabel}}$	***Sig***
Akuntansi Berbasis Akrual	X_1	0.590	0.316	0.05
	X_1	0.518	0.316	0.05
	X_1	0.706	0.316	0.05
	X_1	0.734	0.316	0.05
	X_1	0.649	0.316	0.05
Good governance	X_2	0.760	0.316	0.05
	X_2	0.848	0.316	0.05
	X_2	0.848	0.316	0.05
	X_2	0.508	0.316	0.05

Variable	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	*Sig*
	X_2	0.757	0.316	0.05
SPI	X_3	0.805	0.316	0.05
	X_3	0.765	0.316	0.05
	X_3	0.555	0.316	0.05
	X_3	0.755	0.316	0.05
	X_3	0.851	0.316	0.05
Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Y	0.706	0.316	0.05
	Y	0.753	0.316	0.05
	Y	0.731	0.316	0.05
	Y	0.520	0.316	0.05
	Y	0.663	0.316	0.05

Sumber: data olahan, 2025

3. Hasil Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur konsistensi internal dari instrumen penelitian yang digunakan. Berdasarkan hasil pengolahan data, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* sebesar 0,899, dengan jumlah item sebanyak 20 butir pertanyaan. Nilai ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian berada pada kategori sangat reliabel, mengingat standar interpretasi reliabilitas menyatakan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* di atas 0,8 termasuk dalam kategori reliabel dan nilai di atas 0,9 termasuk sangat reliabel. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan konsisten dan stabil dalam mengukur variabel-variabel yang diteliti. Oleh karena itu, instrumen penelitian ini layak untuk digunakan dalam tahap analisis data selanjutnya.

Tabel 3. *Reliability Statistics*

Cronbach's Alpha	*Cronbach's Alpha Based on Standardized Items*	*N of Items*
.899	.921	20

Sumber: data olahan, 2025

4. Uji Asumsi Klasik (uji Normalitas)

Tabel 4 menunjukkan uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data residual dalam model regresi berdistribusi secara normal. Pengujian ini menggunakan metode *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* Test terhadap nilai *unstandardized residual*. Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *Asymp. Sig.*

(*2-tailed)* sebesar 0,108 dengan jumlah sampel sebanyak 30. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dalam model ini berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas terpenuhi dan model regresi dapat dilanjutkan untuk tahap analisis berikutnya.

Tabel 4. *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters [a, b]	*Mean*	.0000000
	Std. Deviation	.75276362
Most Extreme Differences	*Absolute*	.145
	Positive	.102
	Negative	-.145
Test Statistic		.145
Asymp. Sig. (2-tailed)		.108[c]

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data olahan, 2025

5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 5. Analisis Regresi Berganda

Model		***Unstandardized Coefficients***		***Standardized Coefficients***	***T***	***Sig.***
		B	***Std. Error***	***Beta***		
1	(Constant)	1.619	1.967		.823	.418
	Akuntansi Berbasis Akrual (X1)	.276	.105	.302	2.639	.014
	Good governance (X2)	.205	.116	.244	1.769	.089
	SPI (X3)	.449	.149	.489	3.007	.006

Sumber: data olahan, 2025

Persamaan Regresi:

$$\mathbf{Y = 1{,}619 + 0{,}276X_1 + 0{,}205X_2 + 0{,}449X_3 + e}$$

a. Konstanta (α) sebesar 1,619 menyatakan bahwa jika variabel Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (X_1), *Good governance* (X_2), dan SPI (X_3) dianggap nol, maka nilai dasar dari Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah

sebesar 1,619 satuan (dalam skala yang digunakan, misalnya skor atau indeks).

b. Koefisien X_1 (Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual) sebesar 0,276 menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam variabel ini, dengan asumsi variabel lain konstan, akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,276 satuan. Artinya, semakin baik penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah, maka pengelolaan keuangan akan semakin efektif.

c. Koefisien X_2 (*Good governance*) sebesar 0,205 berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan dalam pelaksanaan *good governance* akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,205 satuan. Ini menandakan bahwa prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan, meskipun pada hasil ini belum signifikan secara statistik (Sig. = 0,089 > 0,05).

d. Koefisien X_3 (SPI) sebesar 0,449 menyiratkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan dalam variabel ini akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,449 satuan. Ini menunjukkan bahwa SPI merupakan faktor yang paling dominan dari ketiganya dalam memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, karena memiliki nilai koefisien paling besar dan signifikan (*Sig.* = 0,006 < 0,05).

Tabel 6. Uji T

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	*(Constant)*	1.619	1.967		.823	.418
	Akuntansi Berbasis Akrual (X1)	.276	.105	.302	2.639	.014
	Good governance (X2)	.205	.116	.244	1.769	.089
	SPI (X3)	.449	.149	.489	3.007	.006

a. *Dependent Variable:* Y

Sumber: data olahan, 2025

Parameter tunggal uji penting (uji t) harus menentukan apakah variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara individual jika variabel independen lainnya konstan. Kriteria dalam pengujian adalah sebagai berikut:

a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *p-value* (*sig.*) < α (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, variabel bebas secara individu berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau *p-value* (*sig.*) > α (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya, variabel bebas secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Pembuktian hipotesis dilakukan berdasarkan uji t, yang dapat dilihat pada kolom t dan sig. pada tabel coefficients. Adapun nilai t tabel sebesar 1,697 (df = 26, n = 30, k = 3), dengan tingkat signifikansi 5%. Berdasarkan hasil uji t tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual (X_1), Nilai signifikansi adalah 0,014, yang lebih kecil dari 0,05, dan nilai t_{hitung} sebesar 2,639 > 1,697 (tabel). Maka H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
b. Pengaruh *Good governance* (X_2), Nilai signifikansi adalah 0,089, lebih besar dari 0,05, dan nilai t_{hitung} sebesar 1,769 < 1,697 (t_{tabel}). Maka H_2 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Good governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Pengaruh SPI (X_3), Nilai signifikansi adalah 0,006, lebih kecil dari 0,05, dan nilai t_{hitung} sebesar 3,007 > 1,697 (t_{tabel}). Maka H_3 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa SPI berpengaruh secara signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 7. Hasil Uji F

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	*Regression*	62.934	3	20.978	33.191	.000[b]
	Residual	16.433	26	.632		
	Total	79.367	29			

a. *Dependent Variable:* Y
b. *Predictors*: (*Constant*), X3, X1, X2

Sumber: data olahan, 2025

Hasil uji F digunakan untuk menguji signifikansi model regresi secara keseluruhan, yaitu apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 6, nilai *Sum of Squares* untuk model regresi adalah 62,934 dengan *Mean Square* sebesar 20,978, dan nilai F sebesar 33,191. Nilai signifikansi (*Sig.*) dari uji F ini adalah 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik, yang berarti bahwa variabel-variabel independen yaitu Akuntansi Berbasis Akrual (X_1), *Good governance* (X_2), dan Sistem Pengendalian Intern (X_3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini layak untuk digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Koefisisen Determinasi

Model Summary

Model	r	*r Square*	*Adjusted r Square*	*Std. Error of the Estimate*
1	.883[a]	.780	.754	.820

a. *Predictors: (Constant),* X3, X1, X2

Sumber: data olahan, 2025

Hasil koefisien determinasi (r^2) pada Tabel 7 menunjukkan seberapa besar variabel-variabel independen dapat menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai r adalah 0,883, yang menunjukkan adanya hubungan yang cukup kuat antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai *r Square* sebesar 0,780 mengindikasikan bahwa sekitar 78% dari variasi dalam Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yaitu Akuntansi Berbasis Akrual (X_1), *Good governance* (X_2), dan Sistem Pengendalian Intern (X_3). Sementara itu, nilai *Adjusted r Square* sebesar 0,754 memperhitungkan jumlah prediktor dalam model, dan menunjukkan bahwa setelah disesuaikan, model ini masih dapat menjelaskan 75,4% dari variasi pada variabel dependen. Nilai *Std.*

Error of the Estimate sebesar 0,820 menunjukkan tingkat kesalahan prediksi dalam model regresi ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun demikian, terdapat pengaruh positif, dampak terbesar terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah lebih banyak dipengaruhi oleh faktor lain, seperti SPI. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penerapan akuntansi akrual memiliki peran penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan, pengaruhnya tidak cukup dominan bila dibandingkan dengan faktor lainnya. Meskipun pemerintah daerah telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan regulasi, masalah utama yang masih dihadapi adalah pada aspek implementasi teknis dan konsistensi pencatatan. Hal ini menyebabkan informasi keuangan yang disajikan belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.

   Menurut Yenni et al (2024), kualitas sumber daya manusia yang baik sangat penting untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik sangat bergantung pada kemampuan pegawai untuk menyusun laporan yang akurat dan tepat waktu. Salah satu upaya untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan pelatihan yang berkelanjutan kepada seluruh pegawai yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan. Namun, seperti yang disarankan oleh Adolph (2025), meskipun pelatihan sangat diperlukan, pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan belum dapat mencapai hasil yang maksimal tanpa adanya dukungan SPI yang kuat. Dengan kata lain, meskipun penerapan akuntansi akrual penting, efektivitasnya sangat tergantung pada kesiapan SDM dan sistem pengendalian yang mendukung.

2. Pengaruh *Good governance* terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Hasil analisis menunjukkan bahwa *good governance* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Meskipun prinsip-prinsip *good governance* berperan penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, pengaruh langsungnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah terbukti tidak cukup signifikan. Hal ini dapat terjadi karena penerapan prinsip *good governance* dalam praktik belum berjalan optimal atau belum terintegrasi dalam sistem manajemen keuangan secara menyeluruh.

   Penelitian ini mendukung pendapat Mardizal et al (2023) yang menyatakan bahwa meskipun gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi motivasi dan kinerja pegawai, faktor-faktor lain seperti pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia lebih dominan dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Dengan kata lain, meskipun prinsip-prinsip *good governance* seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dapat menciptakan suasana kerja yang lebih produktif dan kondusif, hal itu tidak cukup untuk menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif tanpa adanya SPI yang kuat dan penerapan praktik akuntansi yang sesuai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk tidak hanya fokus pada aspek tata kelola, tetapi juga memperkuat kapasitas teknis dan sistem pengendalian dalam pengelolaan keuangan.

3. Pengaruh SPI terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Hasil uji regresi menunjukkan bahwa SPI berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang baik dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan secara signifikan. SPI yang efektif sangat penting untuk menjamin bahwa setiap proses pengelolaan keuangan berjalan sesuai prosedur, serta mampu mencegah kesalahan, penyalahgunaan, dan kecurangan.

   Sintia et al (2022) menyatakan bahwa SPI yang baik akan memastikan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem ini mencakup prosedur yang ketat dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan terhadap setiap transaksi yang terjadi.

Keberhasilan pengendalian internal juga sangat bergantung pada konsistensi dan keberlanjutan penerapannya di setiap tingkat pemerintahan, serta komitmen dari seluruh pihak terkait untuk memastikan sistem ini berjalan dengan baik. Pengendalian internal yang efektif tidak hanya meminimalkan risiko kesalahan dan penyelewengan, tetapi juga memastikan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah berjalan efisien dan akuntabel.

Dengan adanya SPI yang efektif, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mengelola keuangannya. (Rosidah et al., 2023) menyatakan bahwa SPI yang kuat sangat penting dalam meminimalkan risiko kerugian akibat tindakan yang tidak sesuai, serta meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, meskipun banyak pemerintah daerah yang telah memiliki SPI, tantangan besar tetap ada dalam hal implementasi yang konsisten, serta dalam memastikan bahwa setiap unsur pengendalian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

4. Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrual, *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

   Dari hasil uji keseluruhan variabel menunjukkan bahwa seluruh variabel-variabel independent yaitu, Akuntansi Berbasis Akrual, *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penguatan aspek-aspek tersebut sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan daerah.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, faktor-faktor teknis seperti penerapan akuntansi berbasis akrual dan penguatan sistem pengendalian intern lebih berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan dibandingkan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun tata kelola pemerintahan yang baik penting, faktor-faktor teknis yang lebih langsung berkaitan dengan pengelolaan keuangan memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap

efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu lebih fokus pada perbaikan sistem akuntansi dan pengendalian intern untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sistem akuntansi dan pengendalian intern guna mencapai pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

DAFTAR RUJUKAN

Adolph, R. (2025). *Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Dengan Pemahaman Akuntansi Sebagai Variable Moderasi.* 1–23.

Agustina, D., & Dwitayanti, Y. (2024). faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *good governance* (studi kasus opd kota palembang). *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*.

Alhababy, A. M. (2020). *pengaruh kompetensi sumber daya manusia, standar akuntansi pemerintah, good governance, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah istiqomah shinta philadhelphia sri suryaningsum sriyono upn "veteran" yogyakarta*. *14*(5), 1–23.

Frinaldi, A., & Putri, N. E. (2024). *Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia*. *2*(3), 255–263.

Kambuaya, K. S., Nastiti, K., Rohman, A. F., & Febryaningrum, V. (2024). Analisis Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Lanjutan Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Perusahaan Publik di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, *1*(4), 196–201.

Maimanah, A., & Nurdiono, N. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Government Governance terhadap Kinerja Pegawai Bidang Keuangan (Studi pada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung). *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, AKuntansi, Dan Manajemen*, *3*(2), 178–202.

Mardizal, J., Handayani, E. S., Ghazali, A., Al Haddar, G., Anggriawan, F., & Arifudin, O. (2023). Model Kepemimpinan Transformational, Visioner dan Authentic Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Era 4.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 2994–3003. https://j-

innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5195

Maulana M, R. (2021). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Dan *Good governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, *2*(1), 126–137. https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i1.1013

Nafisah, M. Y., & Witono, B. (2024). Pengaruh Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual, *Good governance*, Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Pada Keuangan Daerah. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *5*(1), 14–31.

Negara, I. G. N. S. H. (2020). "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Sistem pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Terhadap Kualitas Laporan Keuangan." *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, *Vol. 14*(No. 1), 16–35.

Puji Afriyeni, Siti, Z., Asriani, S., & Syaherwandi. (2024). *1234 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis , Indonesia Received : 10-06-2024 Revised : 20-06-2024 Approved : 28-06-2024*. *1*(4), 474–485.

Ramadhani, N. D., Puspa, U., & Widodo, W. (2024). *Efektivitas Pengelolaan Kas Kecil Melalui Pengendalian Internal Pada Perusahaan*. *3*(2), 249–256.

Riwukore, J. R., Habaora, F., & Terttiaavini, T. (2022). *Good governance* Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara (Review). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *7*(1), 1–10. https://doi.org/10.36982/jpg.v7i1.1974

Rosana, L., & Bharata, R. W. (2023). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan. *Jurnalku*, *3*(1), 23–34. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v3i1.366

Rosidah, I., Gunardi, Priatna Kesumah, & Royke Bahagia Rizka. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi : EMBA*, *2*(1), 137–156. https://doi.org/10.59820/emba.v2i1.110

Rosyidah, U. F., ZUNIATIN, H., & ROHMA, F. F. (2023). Upaya Sinkronisasi Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan Program Magang Industri Guna Mendorong Efisiensi Kinerja. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(2), 36–41. https://doi.org/10.38142/ahjpm.v2i2.642

Santika, N., Taufik, T., Savitri, D., Akuntansi, P. S., & Riau, U. (2021). *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah0: Peran Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. *2*(2), 319–338.

Sintia, D., Maria, M., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, *6*(2), 107. https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5198

Sipayung, B., & Wahyudi, A. (2022). Penerapan *Good governance* dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Berintegritas di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *6*(2), 14323–14334.

Susanti, N. D., & Andayani, W. (2025). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Batu). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *6*(1), 1–15.

Tariza, T., AP, A. D., & Sultan, S. (2023). Analisis laporan arus kas daerah dalam Manilai Fundamental Fiskal. *Jesya*, *6*(2), 2213–2218. https://doi.org/10.36778/jesya.v6i2.1202

Ukkas, R., Manafe, H. A., & Perseveranda, M. E. (2022). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Intern Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, *4*(2), 198–210. https://www.dinastirev.org/JEMSI/article/view/1207%0Ahttps://www.dinastirev.org/JEMSI/article/download/1207/753

Wawointana, W. J., Saerang, D. P. E., Afandi, D., Akuntansi, J., & Ekonomi, F. (2021). *Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah (Bkad) Kota Manado Evaluation Of The Implementation Of Accrual-Based Goverment Accounting Standards At The Regional Financial And Asset Agency (Bkad) Manado City Jurnal Emba Vol . 9 No . 3 Juli 2021 , Hal . 822 - 83*. *9*(3), 822–831.

Yatminiwati, M. (2019). Implementasi *Good governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, *9*(1), 10–19. https://doi.org/10.30741/wiga.v9i1.410

Yenni, E., Junaedi, A. T., & Wijaya, E. (2024). *Moderasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam*. *4*(2), 24–45.